



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 188.4.45/2/Tahun 2026

TENTANG

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinergitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, berbasis prioritas dan risiko, dan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian program strategi nasional di daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang dibantu oleh Inspektorat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435)

8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

9. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026.

KETIGA : Inspektorat Daerah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Inspektorat Daerah Kota Makassar wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Makassar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026, akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Daerah Kota Makassar.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN BIDANG HUKUM DAN KESEJAHTERAAN	
KEPALA BIDANG	
JF. <i>Penguluh Hukum Muda</i>	
PELAKSANA <i>Penyerasi</i>	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR, *[Signature]*

[Signature]
MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar.
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar.
3. Inspektur Daerah Kota Makassar.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 188.4.45/2/ Tahun 2026
TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN
2026.

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Daerah sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dan ketaatan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan pengawasan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan ke area yang memiliki risiko lebih besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan berbasis risiko lebih besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap pemeriksaan tertentu, perencanaan kegiatan pengawasan tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko.

Pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata kelola pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Internal terdiri dari audit, reviu, monitoring dan evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai acuan, sasaran dan prioritas pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan Kebijakan Pengawasan yang berlaku secara nasional untuk Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Skala Prioritas Pemerintah Kota Makassar, Mandatory Audit, Peta Risiko, Sumber Daya APIP, Anggaran dan Beban Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Indikator pembinaan dan pengawasan yang menjadi acuan kinerja Inspektorat Daerah Kota Makassar dilakukan terhadap dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Program Strategi Nasional di daerah, yaitu:

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
A.	Penanggulangan Kemiskinan		
	1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya angka kemiskinan dan terwujudnya pengentasan kemiskinan ekstrem	1. Terdapat program, kegiatan dan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Data, informasi dan dokumentasi pemutakhiran data penerima berdasarkan nama dan alamat (<i>by name by address</i>). 3. Dilaksanakan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 4. Penyampaian laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara berkala, setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5. Pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem (angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional). 6. Pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional).

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			7. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
	2. Sekolah Rakyat	Terwujudnya Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin	1. Penyediaan lahan dan bangunan sekolah rakyat bagi daerah yang menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat. 2. Dukungan daerah berupa kemudahan perizinan. 3. Penyediaan guru dan tenaga pendidik yang siap dan terlatih sesuai standar kebutuhan untuk sekolah rakyat. 4. Pencapaian target rombongan belajar Sekolah Rakyat. 5. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	3. Pembangunan 3 Juta Rumah	Hambatan implementasi program 3 juta rumah	1. Pemetaan peraturan kepala daerah mengenai penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Data, Informasi, dan/atau dokumentasi fasilitasi percepatan proses pelayanan penerbitan persetujuan bangunan Gedung untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Sosialisasi pembangunan 3 juta rumah melalui berbagai kanal. 4. Evaluasi pelaksanaan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penghapusan retribusi persetujuan bangunan Gedung, dan percepatan proses pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung. 5. Pencapaian target pembangunan perumahan di daerah. 6. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pembangunan 3 juta rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
B.	Ketahanan Pangan		
	Mewujudkan ketahanan pangan nasional	Implementasi program ketahanan pangan di daerah	1. Surat penugasan kepala daerah kepada perangkat daerah terkait pengadaan dan pengelolaan

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			gabah/beras, serta penyaluran cadangan beras pemerintah. 2. Koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah yang membahas topik pengadaan/penyaluran cadangan beras pemerintah. 3. Pemenuhan cadangan pangan beras 1 (satu) tahun sesuai target yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 4. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah sesuai dengan ketentuan.
C. Kesehatan untuk Semua			
	1. Jaminan Kesehatan Nasional	Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah	1. Penetapan regulasi/kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. 2. Program, kegiatan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dalam rencana kerja pemerintah daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Pencapaian target realisasi anggaran sama dengan atau lebih dari 50% dalam 1 (satu) semester tahun berjalan. 4. Pencapaian persentase penduduk yang terdaftar dan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional 5. Pencapaian persentase pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non asn di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. 6. Pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran/bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 secara tepat waktu dan sesuai jumlah sasaran. 7. Pengalokasian dan pembayaran 4% iuran wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dari jumlah pekerja penerima upah. 8. Penyediaan obat dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan. 9. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk mempercepat jaminan

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	2. Makan Bergizi Gratis (MBG)	Implementasi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan makan bergizi gratis	1. Satuan tugas makan bergizi gratis daerah dan berfungsi aktif sesuai kebijakan badan gizi nasional. 2. Penyediaan sarana dan prasarana satuan tugas dengan lengkap dan mendukung pelaksanaan tugas. 3. Penyampaian laporan satuan tugas tepat waktu dan sesuai ketentuan. 4. Pencapaian persentase ibu hamil dan ibu menyusui yang mendapat bantuan makanan bergizi gratis sesuai target. 5. Pencapaian persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai target 6. Pencapaian persentase siswa dan santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai target. 7. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk program makan bergizi gratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
D.	Perluasan Akses Pendidikan		
	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Implementasi pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	1. Penyediaan program, kegiatan dan anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan Pendidikan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Pelaksanaan digitalisasi pembelajaran satuan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan menengah, pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah atas unggul garuda sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan perundang-undangan. 3. Pencapaian persentase madrasah, satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan Pendidikan keagamaan yang memenuhi standar nasional Pendidikan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan Pendidikan inklusif. 4. Pencapaian persentase satuan Pendidikan formal dan non formal yang memenuhi standar nasional pendidikan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			untuk mendukung satuan Pendidikan inklusif. 5. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
E.	Pertumbuhan Ekonomi		
	1. Pengendalian Inflasi	Implementasi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah	1. Program, kegiatan dan anggaran yang memadai untuk mendukung tugas tim pengendalian inflasi daerah dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Penggunaan belanja tidak terduga untuk Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan 9 bahan pokok penting masyarakat, di mana inflasi/indeks perkembangan harga tinggi. 3. Penyediaan data dan/atau informasi langkah-langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah. 4. Penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok secara rutin setiap hari. 5. Peningkatan laju inflasi daerah (year to date) selama 6 (enam) bulan berada di bawah rata-rata nasional. 6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional per tahun 7. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pengendalian inflasi sesuai ketentuan.
	2. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Implementasi dukungan pemerintah daerah terhadap koperasi desa/kelurahan merah putih	1. Program, kegiatan, dan anggaran untuk mendukung pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Penetapan lokasi lahan minimal 1.000 m² dan siap digunakan untuk pembangunan koperasi desa/kelurahan merah putih (sudah memenuhi 4 kriteria lahan, yaitu memiliki alas hak, luasan lahan, lokasi strategis dan kondisi lahan). 3. Penerbitan perizinan dalam rangka pembangunan fisik gerai,

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			pergudangan dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih. 4. Penyelesaian konflik pertanahan dan lahan/tanah. 5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Penyampaian laporan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih dan aktif sesuai target nasional. 7. Pembentukan koperasi merah putih dan aktif sesuai target nasional. 8. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Adapun jenis/bentuk pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui:

1. Reviu terhadap:

- a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - 2) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Dokumen Keuangan Daerah, terdiri dari
 - 1) Rancangan Standar Harga Satuan (SHS)
 - 2) Rancangan Analisis Standar Belanja (ASB)
 - 3) Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran
 - 4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
 - 5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 6) Dokumen keuangan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Monitoring dan Evaluasi terhadap:

- a. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
- b. Penerapan Manajemen Risiko
- c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- d. Upaya Pengendalian dan Pelaporan Inflasi
- e. Reformasi Birokrasi
- f. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- g. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- h. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
- i. Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi
- j. Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah

- k. Program Strategi Nasional.
3. Pemeriksaan Ketaatan (*compliance audit*) merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
 4. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi dan aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan.
 5. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, dengan tahapan:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan;
 - b. Permintaan keterangan/klarifikasi
 - c. Pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan
 - d. Rekomendasi.
 6. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah melalui:
 - a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3;
 - b. Meningkatkan nilai maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
 - c. Meningkatkan penerapan manajemen risiko, dan
 - d. Terselenggaranya pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Dalam rangka menjabarkan kebijakan yang tertuang dalam Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dan untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, efisien, terarah serta terkordinasi maka disusunlah Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Makassar agar dapat berjalan selaras dengan sasaran dan tujuan, pelaksanaan tugas dan fungsi, pencapaian visi dan misi.

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026 mencakup seluruh kegiatan Pengawasan Intern terdiri dari Audit, Reviu, Monitoring dan Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi menyusun rencana kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Makassar mempunyai peran sebagai penunjang kegiatan pengawasan dengan melaksanakan dukungan teknis, dan administratif serta pelaksanaan reviu yang ditentukan demi kelancaran tugas-tugas pengawasan.

II. DEFINISI

Dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Makassar.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Makassar.
- f. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
- g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan unit kerja instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
- i. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
- j. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- m. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan Pemeriksaan intern oleh APIP.
- n. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- o. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

- p. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bawa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- q. Pemeriksaan Kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, serta efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.
- r. Pemeriksaan Ketaatan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
- s. Probitiy Audit adalah pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, untuk memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai kesesuaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan persyaratan kejujuran yang telah ditetapkan.
- t. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khusus.
- u. Audit Investigatif adalah upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui dan mengungkap kebenaran sebuah fakta mengenai ada/tidaknya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- v. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan dalam program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- w. Konsultansi adalah kegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis, asistensi/pendampingan, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunanyang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis. Penugasan konsultansi tidak mengalihkan tanggung jawab kegiatan dari pemangku kepentingan kepada auditor internal.
- x. Bimbingan teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
- y. Asistensi/pendampingan adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.
- z. Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaftasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Penetapan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar; dan
- b. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

IV. OBJEK PENGAWASAN

Dengan memperhatikan tumpang tindih pengawasan dengan pihak eksternal dan APIP Lainnya, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif, dan pengawasan mandatori tetap dilaksanakan atas SKPD yang tidak masuk dalam daftar Pengawasan Berbasis Risiko. Adapun objek pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a. Sekretariat Daerah | : 1 objek |
| b. Sekretariat DPRD | : 1 objek |
| c. Dinas | : 27 objek |
| d. Badan | : 7 objek |
| e. RSUD | : 1 objek |
| f. Kecamatan | : 15 objek |
| g. Sekolah | : 668 objek |
| h. Puskesmas | : 47 objek |
| i. Perumda (BUMD) | : 6 objek |
| Total | : 773 objek |

V. PERSONIL

APIP yang terlibat dalam pengawasan tahun 2026 sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Inspektur;
- b. 4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah;
- c. 1 (satu) orang Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- d. 46 (empat puluh enam) orang Auditor;
- e. 9 (sembilan) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).

Penunjang:

- a. 1 (satu) orang Sekretaris;
- b. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;
- c. 22 (dua puluh dua) orang Pelaksana;
- d. 14 (empat belas) orang Pegawai Pekerja dengan Perjanjian Kerja.
- e. 7 (tujuh) orang Pegawai Pekerja dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

VI. ANGGARAN PENGAWASAN

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Makassar, jumlah anggaran yang dialokasikan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp 1.765.728.020 dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp 730.851.400 dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jumlah Anggaran
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.765.728.020 ✓
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
– Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp15.303.100 ✓
– Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp216.159.500 ✓
– Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Rp274.241.800 ✓
– Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Rp45.625.000 ✓
– Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Rp544.330.800 ✓
– Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp517.716.520 ✓
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
– Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp 20.156.600 ✓
– Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 132.194.700 ✓
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 730.851.400 ✓
1. Kegiatan Perumusan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
– Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp134.902.000 ✓
– Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp169.357.000 ✓
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	
– Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 29.070.000 ✓
– Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp246.177.000 ✓

- Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp53.352.500
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp 97.992.900

VII. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Capaian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Tahun 2026 ini adalah terlaksananya proses pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar sesuai dengan jadwal dan capaian sasaran pengawasan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan.

Capaian hasil adalah efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang tercermin dari terlaksananya tindakan korektif terhadap permasalahan tertentu dengan rekomendasi yang diberikan guna mencegah meluasnya permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Capaian manfaat adalah terpenuhinya pelaksanaan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, pelayanan kepada masyarakat memadai dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Makassar disampaikan kepada Wali Kota.

VIII. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026 untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengawasan Kota Makassar.

WALI KOTA MAKASSAR,



MUNAFRI ARIFUDDIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR
TANGGAL

: 188.4.45/2/ Tahun 2026
: 2 Januari 2026

TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
I	Inspektur Pembantu Wilayah I															
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Keterliban Umum	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	April 2026	April 2026	0	8	8	15	15	15	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Tinggi
2	UPT SPF SD Inpres Manggala	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Kecamatan Manggala	Februari 2026	Februari 2026	0	4	4	5	5	5	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
3	UPT SPF SMP Negeri 24 Makassar	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Kecamatan Tamalate	Februari 2026	Februari 2026	0	4	4	5	5	5	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
4	Reviu atas Layanan Kesehatan/RSUD Tahun 2026	Reviu Kinerja	Keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dinas Kesehatan	Mei 2026	Mei 2026	0	6	6	12	12	12	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
5	Reviu atas Layanan Perizinan Tahun 2026	Reviu Kinerja	Keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mei 2026	Mei 2026	0	6	6	12	12	12	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
6	Audit atas Perjalanan Dinas Tahun 2025	Audit	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas telah dilaksanakan sesuai ketentuan	SKPD Terpilih	Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
7	Audit atas Honorarium Tahun 2025	Audit	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban honorarium telah dilaksanakan sesuai ketentuan	SKPD Terpilih	Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
8	Reviu Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap penerimaan dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah	Badan Pendapatan Daerah	Juni 2026	Juni 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
9	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	SKPD Wilayah Irbab I	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
10	Probity Audit	PDTT	Keyakinan terbatas terhadap kesesuaian proses pengadaan barang/jasa dengan prinsip integritas (<i>integrity</i>), kebenaran (<i>uprightness</i>), dan kejujuran (<i>honesty</i>) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Proyek Strategis Pemda	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
11	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Kesehatan TA. 2025 dan Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun atas Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan Realisasi Akhir Tahun Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	Januari 2026	Januari 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
12	Reviu Laporan Rencana Anggaran Tahun Anggaran Berjalan dan Rencana Penggunaan Sisa DAU Bidang Kesehatan Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	Mei 2026	Mei 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
13	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap I Tahun 2026 Bidang Kesehatan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	Agustus 2026	Agustus 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
14	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap II Tahun 2026 Bidang Kesehatan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	November 2026	November 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
15	Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun TA. 2026	Monitoring	Keyakinan terbatas terhadap pencatatan saldo persediaan akhir tahun	SKPD Wilayah Irbab I	Desember 2026	Desember 2026	0	2	2	4	4	4	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
16	Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun SKPD TA. 2026	Monitoring	Keyakinan terbatas terhadap tutup kas akhir tahun	SKPD Wilayah Irbab I	Desember 2026	Desember 2026	0	2	2	4	4	4	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
17	Monitoring Penyusunan Risk Register SKPD TA. 2027	Monitoring	Memperoleh informasi tentang pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan	SKPD Wilayah Irbab I	Agustus 2026	Agustus 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	12 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
18	Evaluasi Pengelolaan Risiko	Evaluasi	Memperoleh informasi OPD mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengelolaan risiko	SKPD Wilayah Irbab I	Mei 2026	Mei 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	12 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
19	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	Keyakinan atas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	SKPD Wilayah Irbab I	Juni 2026	Juni 2026	0	4	8	8	8	8	0,00	12 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
20	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Monitoring dan Evaluasi	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan APIP	SKPD Wilayah Irbab I	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	3	3	3	3	3	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
21	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan	Monitoring dan Evaluasi	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan BPK RI	Seluruh SKPD	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	1	1	1	6	3	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
22	Konsultasi Pengawasan	Consulting	Memberikan jasa <i>Quality Assurance</i>	SKPD Wilayah Irbab I	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	1	1	1	1	1	0,00	10 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
23	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	Reviu	Keyakinan terbatas bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irbab I	Tentatif	Tentatif	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
II	Inspektur Pembantu Wilayah II															
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	April 2026	April 2026	0	8	8	15	15	15	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit Kinerja	Keyakinan memadai terhadap 3E + ketaatan pelaksanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan	Dinas Perhubungan	April 2026	April 2026	0	6	6	12	12	12	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Tinggi
3	UPT SPF SD Inpres Karuwisi 2	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Kecamatan Panakkukang	Februari 2026	Februari 2026	0	4	4	5	5	5	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
4	UPT SPF SMP Negeri 52 Makassar	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Kecamatan Panakkukang	Februari 2026	Februari 2026	0	4	4	5	5	5	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
5	Reviu Kinerja atas Pelayanan Publik pada Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reviu Kinerja	Keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mei 2026	Mei 2026	0	6	6	12	12	12	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
6	Audit atas Perjalanan Dinas Tahun 2025	Audit	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas telah dilaksanakan sesuai ketentuan		Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
7	Audit atas Honorarium Tahun 2025	Audit	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban honorarium telah dilaksanakan sesuai ketentuan		Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
8	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	SKPD Wilayah Irbn II	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
9	Reviu Manajemen ASN	Reviu	Keyakinan terbatas atas Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
10	Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun TA. 2026	Monitoring	Keyakinan terbatas terhadap pencatatan saldo persediaan akhir tahun	SKPD Wilayah Irbab II	Desember 2026	Desember 2026	0	2	2	4	4	4	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
11	Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun SKPD TA. 2026	Monitoring	Keyakinan terbatas terhadap tutup kas akhir tahun	SKPD Wilayah Irbab II	Desember 2026	Desember 2026	0	2	2	4	4	4	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
12	Monitoring Penyusunan Risk Register SKPD TA. 2027	Monitoring	Memperoleh informasi tentang pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan	SKPD Wilayah Irbab II	Agustus 2026	Agustus 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
13	Evaluasi Pengelolaan Risiko	Evaluasi	Memperoleh informasi OPD mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengelolaan risiko	SKPD Wilayah Irbab II	Mei 2026	Mei 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
14	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	Keyakinan atas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	SKPD Wilayah Irbab II	Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
15	Monitoring dan Evaluasi Upaya Pengendalian dan Pelaporan Inflasi	Monitoring dan Evaluasi	Keyakinan memadai pengujian kesesuaian data pengendalian inflasi daerah	Dinas Perdagangan	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2025	0	12	20	20	20	20	0,00	12 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
16	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Monitoring dan Evaluasi	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan APIP	SKPD Wilayah Irbab II	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	3	3	3	3	3	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
17	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan	Monitoring dan Evaluasi	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan BPK RI	Seluruh SKPD	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	1	1	1	6	3	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
18	Konsultasi Pengawasan	Consulting	Memberikan jasa Quality Assurance	SKPD Wilayah Irbab II	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	1	1	1	1	1	0,00	10 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
19	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	Reviu	Keyakinan terbatas bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irbab II	Tentatif	Tentatif	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
20	Probit Audit	PDTT	Keyakinan terbatas terhadap kesesuaian proses pengadaan barang/jasa dengan prinsip integritas (<i>integrity</i>), kebenaran (<i>uprightness</i>), dan kejujuran (<i>honesty</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Proyek Strategis Pemda	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
III Inspektur Pembantu Wilayah III																
1	Program Pengolahan Perikanan Tangkap	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Perikanan dan Pertanian	Mei 2026	Mei 2026	0	8	8	15	15	15	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Tinggi
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Audit Kinerja	Keyakinan memadai terhadap 3E + ketaatan pelaksanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	April 2026	April 2026	0	6	6	12	12	12	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sedang
3	UPT SPF SD Inpres Banta Bantaeng I	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Kecamatan Rappocini	Februari 2026	Februari 2026	0	4	4	5	5	5	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
4	UPT SPF SMP Negeri 48 Makassar	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Kecamatan Rappocini	Februari 2026	Februari 2026	0	4	4	5	5	5	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
5	Reviu Kinerja atas Pelayanan Publik pada Sektor Pendidikan	Reviu Kinerja	Keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dinas Pendidikan	Mei 2026	Mei 2026	0	6	6	12	12	12	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
6	Audit atas Perjalanan Dinas Tahun 2025	Audit	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas telah dilaksanakan sesuai ketentuan		Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
7	Audit atas Honorarium Tahun 2025	Audit	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban honorarium telah dilaksanakan sesuai ketentuan		Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
8	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	SKPD Wilayah Irbab III	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
9	Probity Audit	PDTT	Keyakinan terbatas terhadap kesesuaian proses pengadaan barang/jasa dengan prinsip integritas (<i>integrity</i>), kebenaran (<i>uprightness</i>), dan kejujuran (<i>honesty</i>) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Proyek Strategis Pemda	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	3 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
10	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	Reviu	Keyakinan terbatas bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irbab III	Tentatif	Tentatif	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
11	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan TA. 2025 dan Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun atas Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan realisasi akhir tahun penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan	Januari 2026	Januari 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
12	Reviu Laporan Rencana Anggaran Tahun Anggaran Berjalan dan Rencana Penggunaan Sisa DAU Bidang Pendidikan Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran TA Berjalan dan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan	Mei 2026	Mei 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
13	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap I Tahun 2026 Bidang Pendidikan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan	Agustus 2026	Agustus 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
14	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap II Tahun 2026 Bidang Pendidikan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan	November 2026	November 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
15	Reviu atas Pemberian THR dan Gaji-13 Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) TA. 2025 pada Dinas Pendidikan Kota Makassar	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Pemberian THR dan Gaji 13 Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) TA. 2025	Dinas Pendidikan	Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
16	Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun TA. 2026	Monitoring	Keyakinan terbatas terhadap pencatatan saldo persediaan akhir tahun	SKPD Wilayah Irbn III	Desember 2026	Desember 2026	0	2	2	4	4	4	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
17	Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun SKPD TA. 2026	Monitoring	Keyakinan terbatas terhadap tutup kas akhir tahun	SKPD Wilayah Irbn III	Desember 2026	Desember 2026	0	2	2	4	4	4	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
18	Monitoring Penyusunan Risk Register SKPD TA. 2027	Monitoring	Memperoleh informasi tentang pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan	SKPD Wilayah Irbn III	Agustus 2026	Agustus 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
19	Evaluasi Pengelolaan Risiko	Evaluasi	Memperoleh informasi OPD mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengelolaan risiko	SKPD Wilayah Irbn III	Mei 2026	Mei 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
20	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	Keyakinan atas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	SKPD Wilayah Irbn III	Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
21	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Evaluasi	Keyakinan terbatas memastikan mutu (<i>quality assurance</i>) atas penyelenggaraan PUG dan PPRG serta mendorong komitmen para pemangku kepentingan untuk mengupayakan PUG melalui PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	April 2026	April 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
22	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Monitoring dan Evaluasi	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan APIP	SKPD Wilayah Irbn III	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	2	3	3	3	3	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
23	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan	Monitoring dan Evaluasi	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan BPK RI	Seluruh SKPD	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	1	1	1	6	3	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
24	Konsultasi Pengawasan	Consulting	Memberikan jasa Quality Assurance	SKPD Wilayah Irbn III	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	1	1	1	1	1	0,00	10 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
IV	Inspektur Pembantu Wilayah IV															
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Kebudayaan	April 2026	April 2026	0	8	8	15	15	15	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Audit Kinerja	Keyakinan memadai terhadap 3E + ketaatan pelaksanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan	Kecamatan Biringkanaya	Mei 2026	Mei 2026	0	8	8	15	15	15	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Tinggi

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
3	UPT SPF SD Percontohan PAM	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Kecamatan Ujung Pandang	Februari 2026	Februari 2026	0	4	4	5	5	5	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
4	UPT SPF SMP Negeri 10 Makassar	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Kecamatan Bontoala	Februari 2026	Februari 2026	0	4	4	5	5	5	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
5	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	SKPD Wilayah Irbn IV	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
6	Probity Audit	PDTT	Keyakinan terbatas terhadap kesesuaian proses pengadaan barang/jasa dengan prinsip integritas (<i>integrity</i>), kebenaran (<i>uprightness</i>), dan kejujuran (<i>honesty</i>) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Proyek Strategis Pemda	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
7	Audit atas Honorarium Tahun 2025	Audit	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban honorarium telah dilaksanakan sesuai ketentuan		Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
8	Audit atas Perjalanan Dinas Tahun 2025	Audit	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas telah dilaksanakan sesuai ketentuan		Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
9	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum TA. 2025 dan Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun atas Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran Dana Alokasi Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Januari 2026	Januari 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
10	Reviu Laporan Rencana Anggaran Tahun Anggaran Berjalan dan Rencana Penggunaan Sisa DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran Dana Alokasi Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Mei 2026	Mei 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
11	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap I Tahun 2026 Bidang Pekerjaan Umum	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Agustus 2026	Agustus 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
12	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap II Tahun 2026 Bidang Pekerjaan Umum	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Nov 2026	Nov 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
13	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun atas Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran Dana Alokasi Umum	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Januari 2026	Januari 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
14	Reviu Laporan Rencana Penggunaan Sisa DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah tahun sebelumnya Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran Dana Alokasi Umum	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Januari 2026	Januari 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
15	Reviu Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang Diangkat pada Tahun Berkenaan	Reviu	Keyakinan terbatas pada Laporan Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran Belanja Pegawai PPPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Januari s.d Desember 2026	Januari s.d Desember 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	12 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
16	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2026	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap kesesuaian pengelolaan BMD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Mei 2026 --> April 2026	Mei 2026 --> April 2026	0	4	4	8	8	8	0	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
17	Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun TA. 2026	Monitoring	Keyakinan terbatas terhadap pencatatan saldo persediaan akhir tahun	SKPD Wilayah Irban IV	Desember 2026	Desember 2026	0	2	2	4	4	4	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
18	Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun SKPD TA. 2026	Monitoring	Keyakinan terbatas terhadap tutup kas akhir tahun	SKPD Wilayah Irban IV	Desember 2026	Desember 2026	0	2	2	4	4	4	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
19	Monitoring Penyusunan Risk Register SKPD TA. 2027	Monitoring	Memperoleh informasi tentang pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan	SKPD Wilayah Irban IV	Agustus 2026	Agustus 2026	0	4	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
20	Evaluasi Pengelolaan Risiko	Evaluasi	Memperoleh informasi OPD mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengelolaan risiko	SKPD Wilayah Irban IV	Mei 2026	Mei 2026	0	4	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
21	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	Keyakinan atas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	SKPD Wilayah Irban IV	Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
22	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Monitoring dan Evaluasi	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan APIP	SKPD Wilayah Irban IV	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	2	3	3	3	3	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
23	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan	Monitoring dan Evaluasi	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan BPK RI	Seluruh SKPD	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	1	1	1	6	3	0	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
24	Konsultasi Pengawasan	Consulting	Memberikan jasa <i>Quality Assurance</i>	SKPD Wilayah Irbab IV	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	1	1	1	1	1	0,00	10 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
25	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	Reviu	Keyakinan terbatas bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irbab IV	Tentatif	Tentatif	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
V Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi																
1	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT	Memberikan keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan tertentu bersumber dari Penanganan Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan dan/atau tujuan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku	Seluruh SKPD	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	6 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
2	Pemeriksaan Investigatif	Pemeriksaan Investigatif	Memberikan keyakinan memadai atas indikasi penyalahgunaan kewenangan dan/atau terjadinya kerugian keuangan negara/daerah yang bersumber dari pengaduan berkadar pengawasan, pelimpahan APIP/APH dan/atau penugasan Kepala Daerah.	Seluruh SKPD	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	2	4	4	4	4	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
3	Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Memberikan keyakinan memadai atas indikasi penyalahgunaan kewenangan dan/atau terjadinya kerugian keuangan negara/daerah yang bersumber dari pelimpahan APH	Seluruh SKPD	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	2	4	4	4	4	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
4	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Evaluasi Internal	1. Memastikan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB dan memastikan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan pemerintah daerah 2. Memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi RB berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan saran dan rekomendasi	SKPD terkait	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	4 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
5	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	Evaluasi Internal	untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (assess dan assist) terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun ZI.	Seluruh SKPD	April 2026	April 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	3 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
6	Pendampingan atas pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Pendampingan	Memastikan pelaksanaan rencana aksi area pencegahan korupsi	SKPD terkait	Februari 2026	November 2026							0,00	1 Dokumen	Laptop, ATK, Printer, Scan	
7	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko (Risiko Fraud)	Evaluasi	Memastikan Penerapan Manajemen Risiko Fraud telah dijalankan	Seluruh SKPD	Mei 2026	Mei 2026	0	12	12	12	12	12	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
8	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan	Monitoring dan Evaluasi	Pengawasan pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan	SKPD terkait	Oktober 2026	November 2026	0	12	12	12	12	12	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
9	Monitoring atas penerapan parameter Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Monitoring	Mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah, menilai tingkat kepatuhan terhadap standar dan indikator nasional, serta mengidentifikasi kelemahan dan risiko yang perlu diperbaiki.	Seluruh SKPD	Mei 2026	Mei 2026	0	15	15	15	15	15	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
10	Monitoring pelaksanaan SPI dan Rencana aksi Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI KPK)	Monitoring	Memastikan bahwa tindak lanjut atas hasil survei dilaksanakan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai rekomendasi KPK. Monitoring ini dilakukan untuk menilai efektivitas upaya perbaikan pada area rawan korupsi, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan rencana aksi, serta memastikan peningkatan integritas dan tata kelola di setiap perangkat daerah (termasuk pelaksanaan SPI di masing-masing PD)	SKPD terkait	April 2026	Mei 2026							0,00	4 Dokumen	Laptop, ATK, Printer, Scan	
11	Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Pemantauan	Untuk memastikan setiap Aparatur Sipil Negara melaksanakan kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas	Seluruh Aparatur Sipil Negara	Maret 2026	April 2026							0,00	1 Dokumen	Laptop, ATK, Printer, Scan	
12	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Klarifikasi/PDPT	Memperoleh informasi terkait materi pengaduan	Seluruh SKPD	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026	0	4	4	4	4	4	0,00	6 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
13	Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Tindak Pidana Penyelenggaraan Perizinan	Monitoring	Pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak pidana perizinan di daerah	Seluruh SKPD	tentatif	tentatif										

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
VI	Lintas Irban															
1	Audit Kinerja Lintas Sektoral Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat serta Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Audit Kinerja Lintas Sektoral	Keyakinan memadai terhadap 3E + ketaatan pelaksanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan (Irban I)	Februari 2026	Februari 2026	0	6	6	12	12	12	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sedang
2	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Audit Infrastruktur SPBE	Keyakinan Memadai terhadap kesesuaian Teknologi Informasi dan Informasi dengan ketentuan yang berlaku	SKPD terpilih (Irban III)	Sep 2026	Sep 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
3	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Audit Keamanan SPBE	Keyakinan Memadai terhadap kesesuaian Teknologi Informasi dan Informasi dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika (Irban III)	Sep 2026	Sep 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan		
4	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Audit Aplikasi SPBE	Keyakinan Memadai terhadap kesesuaian Teknologi Informasi dan Informasi dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika (Irban III)	Oktober 2026	Oktober 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan		
5	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Bantuan Hibah Tahun 2026	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	SKPD Terpilih (Irban I)	Juli 2026	Juli 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
6	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2025	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Irban III)	Maret 2026	Maret 2026	0	8	8	15	15	15	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
7	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap keandalan dan keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK	SKPD Terpilih (Irban III)	April 2026	April 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	4 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
8	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas pembangunan provinsi dan pusat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Irban II)	Mei 2026	Mei 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
9	Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap sinkronisasi Perubahan kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas pembangunan provinsi dan pusat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Irban I)	Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
10	Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah	Sekretariat Daerah (Irbn II)	Maret 2026	Maret 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
11	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah (Irbn I)	Maret 2026	Maret 2026	0	4	4	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
12	Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	Monitoring dan Evaluasi	Keyakinan terbatas terhadap penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa	Sekretariat Daerah (Irbn II)	Maret, Juni, September dan Desember 2026	Maret, Juni, September dan Desember 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	4 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
13	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2025 dan Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun atas Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan penggunaan Dana Alokasi Umum	Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (Irbn IV)	Januari 2026	Januari 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	4 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
14	Reviu Laporan Rencana Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan dan Rencana Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan penggunaan Dana Alokasi Umum	Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (Irbn IV)	Mei 2026	Mei 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
15	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2026	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan penggunaan Dana Alokasi Umum	Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (Irbn IV)	Agustus 2026	Agustus 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
16	Reviu Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Reviu	Keyakinan terbatas atas Pemenuhan Pelayanan Dasar, SPM telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta SPM tercapai dan teridentifikasi kendala penerapan SPM	Sekretariat Daerah (Irban II)	Maret 2026	Maret 2026	0	1	1	1	1	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
17	Reviu Kepatuhan Belanja PDN terhadap kewajaran perhitungan TKDN pada Rencana Belanja PDN	Reviu	Keyakinan atas perhitungan TKDN pada rencana Belanja PDN	Irban II	Desember 2026	Desember 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
18	Reviu Kepatuhan Belanja PDN terhadap kewajaran nilai alokasi anggaran belanja PDN, kewajiban input dalam SIRUP, kewajiban penandaan (tagging) PDN atau impor dalam SIRUP	Reviu	Keyakinan atas kewajaran nilai alokasi anggaran belanja PDN dan proses input dalam SIRUP	Irban II	Maret dan Desember 2026	Maret dan Desember 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
19	Validasi Pengisian Pengukuran Indeks Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	Reviu	Penilaian atas hasil pengukuran Indeks Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	Irban Pencegahan dan Investigasi	Maret 2026	Maret 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
20	Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Nasional	Monitoring dan Evaluasi	Memantau pelaksanaan Program Strategi Nasional	Irban I	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
21	Reviu Rancangan Analisis Standar Belanja TA. 2027	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap kewajaran nilai ASB	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Irban IV)	Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
22	Reviu Standar Harga Satuan TA. 2027	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen Standar Harga Satuan (SHS)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Irban IV)	Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
23	Reviu Rencana Kebutuhan BMD TA. 2027	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap ketepatan perencanaan Kebutuhan BMD	Irban II	Juni 2026	Juni 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
24	Reviu Rancangan APBD TA. 2027	Reviu	Keyakinan terbatas atas penyusunan Rancangan APBD	Irban IV	Sep-26	Sep-26	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
25	Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa melalui e-purchasing	Reviu	Keyakinan terbatas atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing	Irban III	Desember 2026	Desember 2026	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
21	Reviu Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Irban IV)	Tentatif	Tentatif	0	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
VI Sub Bagian Perencanaan																
1	Kapabilitas APIP	Penilaian Mandiri	Meningkatkan kapabilitas APIP agar berada di Level 3 penuh dalam rangka terwujudnya pengawsan intern yang efektif	Inspektorat Daerah (Irban I)	Juni 2026	Juni 2026							39.400.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
2	Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	Penjaminan Kualitas	Tingkat kematangan SPIP Terintegrasi dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian	Seluruh SKPD (Seluruh irban)	Juni 2026	Juni 2026							21.600.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
3	Forum Perangkat Daerah	Sosialisasi	Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Makassar	Seluruh SKPD	Februari 2026	Februari 2026							52.100.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
VII Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan																
1	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Daerah Kota Makassar	Diklat Pembentukan dan Substansi	Meningkatnya kompetensi pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar	Inspektorat Daerah	Januari 2026	Desember 2026							3.477.096.000	99 Orang	Laptop, ATK, Printer, Scan	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelatihan Dikantor Sendiri	Meningkatnya kompetensi pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar	Inspektorat Daerah	Januari 2026	Desember 2026							43.988.400	64 Orang	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
VIII	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi															
1	Bimbingan Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi	Bimbingan Teknis	Meningkatkan pemahaman dalam mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan	Seluruh SKPD	Juni 2026	Juni 2026							47.100.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
2	Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP SKPD	Bimbingan Teknis	memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada aparatur pemerintah dalam melaksanakan evaluasi SAKIP, menganalisis hasil evaluasi SAKIP dan menyusun rencana tindak lanjut yang efektif	Seluruh SKPD	Juni 2026	Juni 2026							71.100.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
3	Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Sosialisasi	Untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi	Seluruh SKPD	Mei, Juni, Oktober dan November 2026	Mei, Juni, Oktober dan November 2026							84.972.000	4 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
4	Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Sosialisasi	Meningkatkan pemahaman kesadaran akan urgensi serta strategi yang diperlukan dalam upaya pencegahan korupsi	Seluruh SKPD	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026							28.800.000	18 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
5	Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Pemuktahiran Data	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan APIP	Seluruh SKPD	Juli dan November 2026	Juli dan November 2026							180.000.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
6	Rapat Pengawasan Tindak Lanjut	Pemuktahiran Data	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan APIP dan BPK	Seluruh SKPD	Januari s.d. Desember 2026	Januari s.d. Desember 2026							201.600.000	12 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

WALI KOTA MAKASSAR,



MUNAFRI ARIFUDDIN